



**PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) CABANG
JAWA TENGAH DALAM UPAYA PENGUATAN PROFESIONALISME
WARTAWAN TAHUN 1980 - 1998**

Skripsi

**Skripsi Ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh :

Mohammad Nur Faiz

13030114140066

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Mohammad Nur Faiz, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 21 Oktober 2020
Penulis,

Mohammad Nur Faiz
NIM.13030114140066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Peristiwa tidak terjadi di meja redaksi. Bagi seorang wartawan, keingintahuan adalah senjata yang harus selalu diasah. Tanpa rasa ingin tahu, karier seorang wartawan akan punah”

-Luwi Ishwara-

Dipersembahkan untuk:
Departemen Sejarah,
PWI Cabang Jawa Tengah,
Bapak, Ibu, dan segenap pembaca

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Yuliati', written in a cursive style.

Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.
NIP 195407251986032001

Skripsi dengan judul “Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah Dalam Upaya Penguatan Profesionalisme Wartawan Tahun 1980-1998” yang disusun oleh Mohammad Nur Faiz (NIM 13030114140066) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Rabu, 21 Oktober 2020.

Ketua,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.
NIP 196106051986032001

Anggota I,



Prof. Dr. Dewi Yulianti, M.A.
NIP 195407251986032001

Anggota II,



Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.
NIP 197211191988021002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. Nurhayati M.Hum.
NIP 196610041990012001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah Dalam Upaya Penguatan Profesionalisme Wartawan Tahun 1980-1998 ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Nurhayati, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah memberikan izin serta kemudahan bagi penulis dalam usaha penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Dra. Dewi Yulianti, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan terhadap perkembangan akademik penulis, dan juga Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si., dan Dr. Alamsyah, M. Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi dapat menjadi lebih baik.
3. Dr. Endang Susilowati, M.A., selaku dosen wali, yang dengan sabar memberikan arahan dan dukungan terhadap perkembangan akademik penulis.
4. Segenap pengajar di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan, seluruh staf administrasi Departemen Sejarah khususnya Mbak Fatma dan Mas Oscar yang telah memberikan pelayanan secara maksimal selama penulis kuliah di Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.

5. Sejumlah pegawai di Kantor PWI Cabang Jawa Tengah di Semarang, pegawai di Monumen Pers Nasional Surakarta (Mas Bambang, Mbak Etik) yang membantu penulis dalam pengumpulan sumber ketika magang di sana dan UPT Perpustakaan Undip Lantai 4 yang telah banyak membantu penulis selama kegiatan pengumpulan sumber.
6. Bapak Amir Machmud selaku ketua PWI Cabang Jawa Tengah periode 2018-2019, bapak Sasongko Tedjo selaku ketua PWI Cabang Jawa Tengah periode 2009, bapak Sutjipto selaku wakil ketua PWI Cabang Jawa Tengah periode 1996-2000, bapak Hendro Basuki yang selama penelitian memberikan dokumen-dokumen pendukung dan banyak informasi penting, sehingga membantu dalam penulisan skripsi. Tidak lupa sejumlah informan yang terdiri dari para wartawan *Suara Merdeka*, *Wawasan*, dan Metro TV. Berbagai kesaksian dan informasi yang diceritakan merupakan informasi penting dalam upaya penulisan skripsi ini.
7. Sejumlah sahabat-sahabat penulis di Departemen Sejarah angkatan 2014 terkhusus untuk kelas B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Teman-teman seperjuangan yang sudah menemani penulis selama kuliah di Departemen Sejarah, Zumri, Octa, Putro, Adit Estiawan, Ardian, Asna, Nila, Lela, Indah, Azizah, Endah, Nurul, Akmal, Nurullahi, Daksa, Aldi, Yanti, Ais, Dhea, Suci, Gisa, Mellya, Icha, Wahyu dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Untuk sahabat penulis di PMII Komisariat Diponegoro angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan selama di Semarang, Aripin, Saeroni, Irwanto, Listi, Riyana, Nurul Fatimah, Nika, Reka, Mentari, dan segenap keluarga besar PMII Komisariat Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Serta keluarga PMII Rayon Budaya FIB Undip yang menemani satu periode penulis menjadi ketua untuk periode 2017-2018. Terima kasih juga teman-teman di LPM Hayamwuruk FIB yang selalu menemani penulis dalam liputan majalah periode 2016-2017.

9. Terima kasih penulis ucapkan untuk orang tua sekaligus guru penulis ketika mondok di Pesantren Mahasiswa Insanul Iman dari awal kuliah hingga akhir, Kyai Hamim Yusuf, Pak Jamaah, Pak Syafi', Pak Mufti, Pak Shofi, Pak Abdillah serta pengurus Pondok yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang senantiasa tidak pernah lelah mengajar, membimbing, dan mendoakan santri-santrinya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat yang sudah mau menemani penulis dalam suka maupun duka para santri Pesma Insanul Iman Bulusan terhadap penulis, Mas Erik, Mas Afnan, Mas Iqbal, Mas Burhan, Mas Anwar, Mas Bukhori, Mas Lutfi, Mas Rohman, Aziz, Roni, Fatur, Ilyas, Afif, Anja/Ahul, Alvan, Anang, Aji, Rizal, Wafa, Hafiz, Iqbal, Ghazi yang selalu memberikan semangat dan bantuannya agar secepatnya lulus.
10. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Sri Syafaatun, Bapak Masykuri, dan adik-adikku, Fiqoh, Afiq, Zahra. Terima kasih atas dukungan moral, spiritual, material dan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis dibalas lebih besar oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa pada hakikatnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna dijadikan pembelajaran di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan keberkahan bagi pembaca.

Semarang, 21 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA CABANG JAWA TENGAH: PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI	22
A. Pembentukan PWI	22
B. Pembentukan PWI Kring Semarang dan PWI Cabang Jawa Tengah	26
1. Pembentukan PWI Kring Semarang	26
2. PWI Cabang Jawa Tengah Pada Masa Orde Baru	32
C. Kegiatan-kegiatan PWI Cabang Jawa Tengah	40
1. Bidang Hukum	40
2. Bidang Pendidikan	41
3. Bidang Olahraga	42
BAB III KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) DAN KASUS-KASUS PELANGGARANNYA	50
A. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI	50
B. Kasus Pelanggaran KEJ	56
1. Kasus Pelanggaran Penyalahgunaan Profesi	56

2.	Kesalahpahaman Dalam Menyampaikan Berita tentang Pejabat Daerah	58
3.	Kasus Pemberitaan yang Mengandung Tahayul dan Sensasi Berlebihan	62
4.	Kasus Pelanggaran Wartawan Meminta Imbalan Pada Tahun 1988	65
5.	Kasus Pemberitaan Tanpa Konfirmasi dengan Sumber Berita	68
6.	Kasus Suap Terhadap Wartawan Pada Tahun 1995	70
BAB IV	UPAYA PENGUATAN PROFESIONALISME WARTAWAN PWI CABANG JAWA TENGAH	74
A.	Standarisasi Profesi Wartawan	74
B.	Upaya Pencegahan Pelanggaran KEJ	80
1.	Pemerataan Pendidikan Wartawan	81
2.	Bekerjasama dengan Institusi di Jawa Tengah	83
C.	Upaya Penguatan Mutu Profesionalisme Wartawan PWI Cabang Jawa Tengah	86
1.	Karya Latihan Wartawan	87
2.	Penerbitan Kartu Pers Tunggal dari PWI	89
3.	Lokakarya Jurnalistik bidang Hukum dengan LBH Semarang	92
4.	Penerbitan Buku Putih PWI Cabang Jawa Tengah	93
5.	Pengendalian Mutu Terpadu (PMT)	95
6.	Dialog Interaktif Wartawan	98
BAB V	SIMPULAN	100
	DAFTAR PUSTAKA	103
	DAFTAR INFORMAN	110

DAFTAR SINGKATAN

AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
Depkes	: Departemen Kesehatan
DK PWI	: Dewan Kehormatan PWI
DKD	: Dewan Kehormatan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ekuin	: Ekonomi Keuangan dan Industri
FDWB	: Forum Diskusi Wartawan Bandung
Forjas	: Forum Jurnalis Semarang
G30S	: Gerakan 30 September
GKM	: Gugus Kendali Mutu
Golkar	: Golongan Karya
GOR	: Gedung Olahraga
GRIS	: Gedung Rakyat Indonesia Semarang
HPN	: Hari Pers Nasional
HUT	: Hari Ulang Tahun
IJTI	: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
IKWI	: Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia
IPMI	: Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia
IPPHOS	: <i>Indonesia Press Photo Service</i>
KEJ	: Kode Etik Jurnalistik
KLB	: Kongres Luar Biasa
KLW	: Karya Latihan Wartawan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
Lakhar	: Pelaksana Harian
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia

Menpen	: Menteri Penerangan
Orba	: Orde Baru
Pangdam	: Panglima Daerah Militer
PD/PRT	: Peraturan Dasar/ Peraturan Rumah Tangga
Pemda	: Pemerintah Daerah
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKJ	: Perkumpulan Kaum Jurnalis
PMI	: Palang Merah Indonesia
PMMI	: Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia
PMT	: Pengendalian Mutu Terpadu
Polkam	: Politik dan Keamanan
Porwanas	: Pekan Olahraga Wartawan Nasional
PPG	: Pembinaan Pers dan Grafika
PRPP	: Pusat Rekreasi dan Pameran Pembangunan
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
R.M.	: Raden Mas
RRI	: Radio Republik Indonesia
SI	: Sidang Istimewa
SIT	: Surat Izin Terbit
SIUPP	: Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
SJI	: Sekolah Jurnalisme Indonesia
SK	: Surat Keputusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SPS	: Serikat Penerbit Surat kabar
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UKW	: Uji Kompetensi Wartawan
UU-Pers	: Undang-undang tentang Pers

DAFTAR ISTILAH*

- Wartawan amplop/bodrex* : Julukan yang diberikan kepada para wartawan yang suka menerima uang dari sumber berita. Biasanya terjadi dalam konferensi pers atau temu pers yang diadakan oleh suatu instansi.
- Blandong* : Tukang penebang kayu di hutan. Pekerja dibidang perkayuan dan penebang hutan di daerah pedalaman dan pantai utara Pulau Jawa.
- check and recheck* : Periksa dan periksa kembali. Merupakan proses pengecekan kebenaran suatu berita sebelum diterbitkan kepada masyarakat.
- delik pers* : Pelanggaran pers. Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Tindak pidana pers.
- Kring* : Nama lain dari cabang. Untuk menunjukkan suatu daerah tertentu.
- Nyambi pekerjaan* : Melakukan pekerjaan lain di samping pekerjaan pokok pada waktu senggang, melakukan pekerjaan rangkap.
- nyeleneh* : Aneh, ceroboh, tidak biasa, tidak umum, unik.
- Oplah* : Istilah dalam penerbitan surat kabar. Jumlah barang cetakan koran yang diedarkan di masyarakat.
- Sumir* : Sidang pengadilan seperti ketika menyidangkan pelanggaran lalu lintas.
- workshop* : Lokakarya, seminar, pelatihan.

*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

ABSTRAK

Skripsi ini berisi pembahasan tentang Upaya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah dalam penguatan profesionalisme wartawan anggota PWI Cabang Jawa Tengah, dari tahun 1980 hingga 1998. Penelitian dilakukan melalui empat tahap dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah.

Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada tiga pertanyaan penelitian, yaitu *pertama*, bagaimana proses pembentukan PWI di Indonesia dan di Jawa Tengah. *Kedua*, permasalahan apa yang dihadapi oleh PWI Cabang Jawa Tengah selama periode 1980-1998. *Ketiga*, bagaimana usaha-usaha PWI Cabang Jawa Tengah dalam upaya penguatan profesionalisme wartawan, dan apa hasil dari upaya-upaya itu untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini ditempatkan dalam lingkup kajian sejarah sosial-politik.

PWI didirikan pada 9 Februari 1946 di Surakarta, menjadi titik awal perkembangan organisasi kewartawanan di Indonesia. Dalam perkembangannya pada tahun 1951 PWI memiliki 11 cabang di seluruh Indonesia termasuk Semarang dengan nama Kring untuk tingkat kota. Pada tahun 1980 PWI Kring Semarang sudah berubah nama menjadi Cabang Jawa Tengah dan atas dasar SK dari PWI Pusat No. 002/PP-PWI/1981, PWI resmi diganti nama cabang Jawa Tengah dan meluas setingkat provinsi pada tahun 1981. Sesuai dengan kehidupan politik pada era itu (1980-1998), kehidupan pers sangat dikendalikan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan upaya untuk menguasai organisasi kewartawanan dan mengendalikan insan pers. Wartawan harus bisa membentuk opini positif ketika menerbitkan berita, sehingga mampu berperan dalam pembangunan pers nasional. Oleh sebab itu, PWI Cabang Jawa Tengah selalu menjalin hubungan positif dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

KEJ dibuat oleh wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanan. Mentaati KEJ berarti anggota PWI Cabang Jawa Tengah tidak akan menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul dan sensasional. Penegakan KEJ dilakukan secara konsisten dan konsekuen, bukan hanya meningkatkan kualitas karya wartawan, melainkan juga mencegah konflik dengan publik. PWI Cabang Jawa Tengah melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers dan menginstruksikan anggotanya menerapkan pelaksanaan KEJ. Oleh sebab itu, wartawan PWI Cabang Jawa Tengah harus dapat memperhatikan kecermatan daripada kecepatan dalam menyebarkan berita, sehingga kasus pelanggaran KEJ dapat diminimalisir. Wartawan PWI Cabang Jawa Tengah tidak cukup hanya mengandalkan idealisme saja, tetapi juga harus didukung dengan profesionalisme yang tinggi. Di samping itu, wartawan juga harus dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif.

ABSTRACT

This thesis contained a discussion of the efforts of the Central Java Branch of the Indonesian Journalists Association (PWI) in strengthening the professionalism of journalists who are members of the Central Java Branch of PWI, from 1980 to 1998. The research was conducted through four stages in the historical method, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historical writing.

The discussion of the thesis focussed on three research questions, namely first, how was the process of establishing PWI in Indonesia and in Central Java. Second, what problems were faced by the Central Java Branch of PWI during the period 1980-1998. Third, how were the efforts of the Central Java branch of PWI in an effort to strengthen the professionalism of journalists, and what were the results of these efforts to examined these problems, this research was placed within the scope of the study of socio-political history.

PWI was founded on February 9, 1946 in Surakarta, as a starting point for the development of journalism organizations in Indonesia. In its development, in 1951 PWI had 11 branches throughout Indonesia including Semarang with the name "Kring" for the city level. In 1980 PWI Kring Semarang changed its name to the Central Java Branch and on the basis of a decree from PWI Pusat No. 002 / PP-PWI / 1981, PWI was officially renamed the Central Java branch and expanded to the provincial level in 1981. Based on the political life of that era (1980-1998), the life of the press was heavily controlled by the government. The regulations made by the government were an attempt to controlling journalist organizations and the press. Journalists must be able to created positive opinions when published news, so that they could play a role in the development of the national press. Therefore, PWI Central Java Branch always maintained positive relationships with local governments, private companies, and obeyed to the Journalistic Code of Ethics (KEJ).

KEJ was made by journalists as a moral reference to implemented journalist duties. Obeying the KEJ meant that members of the Central Java Branch of PWI would not broadcast journalistic works that were misleading, distorting facts, slanderous, obscene and sensational. KEJ enforcement was conducted consistently and consequently, not only improved the quality of journalists' work, but also prevented conflicts with the public. PWI Central Java Branch conducted studies for the development of press life and instructed its members to implementing the implementation of the KEJ. Therefore, PWI Central Java branch journalists had to pay attention to accuracy rather than speed in spreading news, so that cases of KEJ violations could be minimized. The Central Java branch of PWI journalists was not enough to relying on idealism alone, but also must be supported by high professionalism. In addition, journalists had to be channel of people's aspirations and aldo as pillar of constructive social control.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk pada 9 Februari 1946, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi cabang-cabang di daerah baru didirikan beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1950 di Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dibentuk PWI dengan nama PWI Kring Semarang. Perkembangan organisasi PWI di Semarang sejak berdiri sampai 1970-an tidak terdokumentasi dengan baik.

Sejak berdiri pada 9 Februari 1946, PWI menjadi satu-satunya organisasi kewartawanan di tanah air. Bahkan keadaan itu diperkuat dengan keputusan Menteri Penerangan (Menpen) tahun 1976, mulailah era partai Golkar, pada tahun 1970-an kader partai menguasai semua ketua PWI cabang yang ada. Ketika pemilihan ketua baru PWI, semuanya harus berada di bawah Golkar. Hal tersebut menjadi lebih jelas dengan adanya SK Menpen tahun 1976 yang menetapkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan serta kepengurusan PWI yang didominasi oleh kekuatan Golkar.

Pada saat itu, banyak birokrat, termasuk militer, menduduki posisi-posisi strategis dalam organisasi. Bahkan kedudukan ketua PWI pusat dipegang oleh anggota militer. Politisasi semakin kuat ketika para ketua diberi kursi di DPR dan DPRD. Dominasi tersebut berakhir setelah reformasi bergulir pada tahun 1998. Setelah pemerintahan Suharto berhasil digulingkan, PWI bukan lagi satu-satunya organisasi wartawan yang ada di Indonesia, karena setelah tahun 1998 kebebasan pers kembali diberikan oleh presiden Habibie.

Kewartawanan itu merupakan sebuah profesi, sama seperti advokat, notaris, dan dokter. Ada beberapa syarat bagi sebuah pekerjaan untuk dapat disebut

sebagai profesi.¹ Menjadi wartawan itu seperti seorang dokter yang selalu mengobati pasien setiap hari, sementara tugas wartawan adalah memberikan obat berupa berita-berita yang benar kepada masyarakat. Ada rasa tanggung jawab yang mengaitkan pada kode etik kewartawanan atau Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

KEJ itu penting, sehingga setiap anggota PWI wajib mengetahui, memahami, dan mengaplikasikannya ketika sedang bertugas sebagai wartawan. KEJ merupakan rambu-rambu untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam pembuatan sebuah berita. Untuk menjaga mutu profesi dan memelihara kepercayaan dari masyarakat luas, kode etik tersebut bukan dibuat oleh orang lain, melainkan oleh kalangan wartawan sendiri. Sistem pengawasan untuk mematuhi semua kode etik dan aturannya pun dibentuk oleh sebuah dewan yang bernama Dewan Kehormatan PWI (DK PWI). Ketika terjadi pelanggaran oleh beberapa anggota wartawan, DK PWI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.

Kode etik bukan sesuatu yang statis, tetapi dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Liberalisasi dunia pers, yang ditandai oleh pemberlakuan lima peraturan bidang pers oleh pemerintah pada Juni 1998, menjadikan PWI bukan satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. Sepanjang sejarah Orde Baru, anggota PWI telah menunjukkan beberapa kali penolakannya terhadap sejumlah pejabat penting yang terlibat dalam aneka rekayasa di belakang layar garapan pemerintah. Mulai kelahirannya hingga tiga dekade berikutnya posisi PWI sebagai organisasi profesi kewartawanan di Indonesia semakin kokoh. Ancaman perpecahan yang sempat mewarnai perjalanannya di kongres XIV di Palembang pada tahun 1970 cepat sirna, karena kubu yang bertikai mampu menahan diri dan berkompromi untuk merapat kembali dalam satu barisan.²

Menurut Ketua Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB), Joko Suseno,

¹Tedjo Sasongko, Sosiawan, dkk., *Memahami dan Memaknai Kebebasan Pers* (Semarang: PWI Cabang Jawa Tengah, 2002), hlm. 13.

²Dewi Yuliati, Triyanto Triwikromo, dkk., *Melacak Jejak Pers Jawa Tengah* (Semarang: PT Masscom Graphy, 2008), hlm. 82.

“PWI harus memperbaiki diri dan jangan lagi merusak citra pers Indonesia, sebab pers merupakan elemen yang akan membangun bangsa. Pengurus PWI harus benar-benar mampu membawa aspirasi anggotanya, bukan sebaliknya malah mematikan anggotanya”.³

Menurut HM Nurdin Mangkana (Mantan Wakil Ketua PWI Sulawesi Selatan periode 1993-1998), ada kesan bahwa PWI menjadi alat dari pemerintah, sehingga sejumlah anggota PWI ingin menghapus stigma PWI sebagai alat pemerintah.⁴

PWI pusat mengeluarkan kebijakan restrukturisasi jenjang kepengurusan PWI secara administratif, pengurus cabang yang sejak kelahirannya setingkat kabupaten diperluas menjadi setingkat provinsi. Atas kebijakan itu PWI Kring Semarang menjadi Cabang Jawa Tengah. PWI Cabang Surakarta yang sebenarnya masih masuk dalam lingkup provinsi Jawa Tengah tetap berdiri sendiri, karena alasan historis, kota tersebut merupakan kota istimewa yang menjadi tempat kelahiran PWI.

Selain menjadi alat pemerintah, banyak penerbitan pers yang lebih berfungsi sebagai corong kepentingan golongan tertentu, karena lebih memihak beberapa golongan masyarakat. Hal ini menjadi penyebab konflik antar kepentingan masyarakat tertentu. Seperti contohnya di Jawa Tengah banyak bermunculan wartawan *bodrex/amplop* (wartawan gadungan) yang sangat meresahkan masyarakat, karena hanya mengambil keuntungan dari kelompok yang memberinya uang setelah mendapatkan informasi dari narasumber dan menerbitkan berita sesuai pesanan kelompok yang membayar. Wartawan *bodrex/amplop* meresahkan dan membuat simpang siur masyarakat, karena pembuatan berita mereka menyalahi KEJ. Kasus tersebut merupakan permasalahan yang harus dihadapi PWI Cabang Jawa Tengah pada tahun 1984 karena kualitas dan tingkat profesional individu dari anggota masih kurang.

Anggapan negatif kepada wartawan juga memunculkan julukan “wartawan pemeras” atau “wartawan kriminal”. Julukan “pemeras” diberikan kepada wartawan yang suka menukar berita penyelewengan yang dilakukan seseorang,

³“PWI Jangan Ulangi Kesalahan”, *Kompas*, 23 Oktober 1998, hlm. 7.

⁴“PWI Jangan Ulangi Kesalahan”, *Kompas*, 23 Oktober 1998, hlm. 8.

misalnya korupsi atau skandal seks, dengan uang. Biasanya wartawan menelepon atau mendatangi langsung pelaku korupsi atau skandal seks, kemudian mengancam apabila tidak diberi uang akan menulis berita penyelewengan tersebut. Tindakan negatif ini melahirkan sindiran bahwa wartawan bukan bagian dari pers melainkan “peras”.⁵

Menanggapi adanya kasus wartawan *bodrex/amplop* di PWI Cabang Jawa Tengah, pengurus PWI Pusat langsung menyikapi hal tersebut dengan cara menerbitkan SK (Surat Keputusan) yang berisi petunjuk pelaksanaan penertiban wartawan dan kewartawanan pada tahun 1989. PWI Cabang Jawa Tengah setuju dengan sikap PWI Pusat dengan cara menerbitkan buku daftar anggota PWI Cabang Jawa Tengah tahun 1990-1991. Buku tersebut disebarluaskan di berbagai daerah di Jawa Tengah agar masyarakat mengetahui siapa saja wartawan asli yang ada di Jawa Tengah. Penerbitan buku daftar anggota wartawan PWI Cabang Jawa Tengah dikenal dengan sebutan “Buku Putih PWI Jawa Tengah” yang berhasil mengurangi wartawan *bodrex/amplop* yang mengotori dunia kewartawanan Jawa Tengah. Buku putih tersebut juga membantu masyarakat dalam rangka ikut menertibkan wartawan-wartawan yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah. Upaya penertiban, peningkatan kualitas anggota PWI, dan kinerja organisasi merupakan program prioritas pengurus PWI Cabang Jawa Tengah dalam dua dekade (1980-2000).⁶ Masalah-masalah wartawan *bodrex/amplop*, pelanggaran KEJ, penertiban kinerja wartawan, peningkatan mutu profesi wartawan merupakan persoalan penting yang diungkap dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana proses pembentukan PWI di Indonesia dan di Jawa Tengah. *Kedua*, permasalahan apa yang dihadapi oleh PWI Cabang Jawa Tengah selama periode

⁵“*Ensiklopedi Pers Indonesia*”, Persatuan Wartawan Indonesia (Jakarta: EPI PWI, 2008), hlm. 820.

⁶Yuliati, dkk, *Melacak Jejak Pers*, hlm. 85.

1980-1998. *Ketiga*, bagaimana usaha-usaha PWI Cabang Jawa Tengah dalam upaya penguatan profesionalisme wartawan, dan apa hasil dari upaya-upaya itu.

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup diperlukan untuk menghasilkan penulisan sejarah yang bersifat kritis dan analitis serta menjadi acuan kerangka berpikir. Menurut Taufik Abdullah, pembatasan ruang lingkup dalam studi sejarah diperlukan untuk meneliti secara empiris dan mempertanggungjawabkan penelitian secara metodologis, sehingga hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Masalahnya terletak pada bagaimana sejarawan membuat pembatasan ruang lingkup studi itu dan merumuskannya.⁷

Pembatasan ruang lingkup penelitian ini meliputi cakupan spasial, temporal, dan keilmuan. Ruang lingkup spasial merupakan batasan wilayah atau daerah, tempat, dan kedudukan subjek penelitian. Lingkup spasial penelitian ini adalah regional Jawa Tengah, karena PWI lahir pada 9 Februari 1946 di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kota Surakarta. Semula ada cabang-cabang di tingkat kabupaten dan kota, setelah 1980 ditetapkan dengan cabang-cabang di tingkat provinsi.

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dipilih dalam penelitian. Lingkup temporal penelitian ini adalah antara 1980 sampai dengan 1998. Tahun 1980 merupakan tahun awal pembentukan PWI Cabang Jawa Tengah, yang sebelumnya bernama PWI Kring Semarang sejak tahun 1956. Pada tahun 1981 nama PWI Kring Semarang diganti PWI Cabang Jawa Tengah agar cakupannya lebih luas. Perubahan nama dilakukan atas dasar Surat Keputusan PWI No. 002/PP-PWI/1981 tertanggal 7 Maret 1981. Tahun 1998 dipilih sebagai batas temporal karena tahun itu merupakan awal masa reformasi kemerdekaan, dan PWI sudah tidak lagi menjadi organisasi wartawan tunggal karena organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) lahir.

⁷Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1978), hlm. 10.

Berkaitan dengan perubahan kebijakan dalam dunia pers, presiden Habibie melalui Menpen Yunus Yosfiah melakukan kebijakan penting dengan mencabut SK Menpen Nomor 47/Kep/Menpen/1975 yang menjadi payung hukum PWI sebagai wadah tunggal organisasi kewartawanan dan Serikat Pekerja Surat kabar (SPS) sebagai wadah tunggal organisasi perusahaan penerbit. Pencabutan wadah tunggal PWI dan SPS itu tertuang dalam SK Menpen RI No. 133/SK/Menpen/1998.⁸

Ruang lingkup keilmuan merupakan batasan aspek-aspek yang dianalisis. Ruang lingkup penelitian didasarkan pada argumentasi yang jelas dan logis yang didukung oleh data dan fakta.⁹ Lingkup keilmuan penelitian ini adalah ilmu jurnalistik dan sejarah organisasi PWI Cabang Jawa Tengah periode 1980-1998. Sudut pandang untuk menjawab pertanyaan penelitian bisa dengan mudah dipahami dengan ilmu jurnalistik.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan di atas, dalam penulisan ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, menjelaskan sejarah pembentukan PWI sebagai organisasi wartawan yang ada di Indonesia. *Kedua*, menjelaskan pembentukan PWI Cabang Jawa Tengah periode 1980-1998. *Ketiga*, menjelaskan permasalahan PWI Cabang Jawa Tengah. *Keempat*, menjelaskan usaha-usaha PWI Cabang Jawa Tengah dalam penguatan profesionalisme wartawan dan hasil dari upaya-upaya penguatan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini melakukan telaah terhadap beberapa pustaka yang relevan. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk membandingkan berbagai bahan pustaka, seperti buku dan artikel yang dipakai untuk mendapatkan data, penjelasan yang relevan

⁸Yuliati, dkk, *Melacak Jejak Pers*, hlm. 90.

⁹Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: Jurusan Sejarah FIB Undip, 2014), hlm. 20.

dengan penelitian ini. Buku *pertama*, yang berjudul *Humanisme dan Kebebasan Pers: Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama* dari penerbit Kompas tahun 2001.¹⁰ Dalam buku tersebut diterangkan perjalanan karir Jakob Oetama dan PK Ojong merintis koran yang terbit pertama pada tanggal 28 Juni 1965. Selain itu, diterangkan juga perkembangan pers dari sebelum kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Jakob Oetama dan PK Ojong juga pernah memimpin koran *Kompas* dan menjadi pemimpin utama di koran tersebut. Dalam pandangan penulis ada empat pokok tonggak dalam hidup di dunia wartawan sesuai buku tersebut yaitu; *pertama*, pengalaman dan pendidikan yang diperoleh seorang wartawan dalam meniti karir profesinya. *Kedua*, wartawan wajib menyebarkan informasi benar, berkomunikasi, dan membantu pencerdasan bangsa. *Ketiga*, memanfaatkan momentum yang disediakan oleh sejarah untuk meraih kebebasan berpendapat. *Keempat*, para wartawan tidak boleh kering akan kekayaan hati dan emosi manusia yang mereka hadapi.

Jakob Oetama menjadi anggota PWI pusat pada tahun 1967, sehingga buku ini relevan dalam memberikan informasi tentang PWI secara nasional ketika Jakob menjadi bagian dari PWI pada tahun 1967-1980. Secara ringkas buku ini memuat penjelasan tentang kebebasan pers yang relevan untuk bahan kajian penulisan skripsi tentang PWI. Melalui buku ini kita akan mengetahui sejarah pers, terutama ketika Jakob Oetama bergiat dalam dunia jurnalistik, dan menjadi anggota PWI. Adapun perbedaan karya di atas dengan penulisan skripsi adalah bahwa dalam karya di atas tidak dijelaskan secara detail sejarah PWI secara nasional sehingga kurang mendalam kajian tentang sejarah PWI secara nasional.

Buku *kedua* adalah *Melacak Jejak Pers Jawa Tengah*, karya Dewi Yulianti, dkk tahun 2008.¹¹ Buku ini diterbitkan oleh PWI Cabang Jawa Tengah bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional tahun 2008. Buku ini menjelaskan secara detail sejarah PWI dari awal PWI dibentuk lalu menjadi Kring Semarang dan

¹⁰Kompas, *Humanisme dan Kebebasan Pers (Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama)* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001).

¹¹Yulianti, dkk, *Melacak Jejak Pers Jawa Tengah* (Semarang: PWI Jawa Tengah, 2008).

berubah nama menjadi Cabang Jawa Tengah, dan juga menjelaskan struktur organisasi mulai dari nama ketua hingga anggota dari periode ke periode. Dalam buku ini juga dijelaskan sejarah PWI sejak kelahirannya pada tahun 1946 sampai zaman awal Reformasi 1998. Diuraikan juga tentang organisasi-organisasi pers masa awal Reformasi, yaitu di mana semua wartawan yang bukan anggota PWI dapat mendirikan organisasi wartawan yang lain, seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Selain itu dalam buku ini dijelaskan profil tentang wartawan-wartawan yang tersebar di Jawa Tengah yang dinilai memiliki peranan penting dalam khazanah pers dan perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia. Dilengkapi dengan penelitian dan pembahasan hubungan dan interaksi positif antara pemerintah, wartawan, dan masyarakat. Membahas pers sebagai pemersatu bangsa dan penguat nasionalisme masyarakat Indonesia. Pers adalah gambaran masyarakat pemilikinya. Pers tidak bisa lebih bagus atau lebih buruk dari itu. Wilayah Jawa Tengah dinilai penting mengingat daerah ini pada masa lalu sering dijadikan pusat kegiatan pergerakan, baik yang bersifat nasional maupun keagamaan.

Buku ini relevan dalam membantu memperjelas kajian penulis tentang PWI di Jawa Tengah untuk penelitian selanjutnya, karena memberikan penjelasan secara detail sejarah PWI, struktur organisasi di setiap periode, tokoh-tokoh pers zaman penjajahan hingga kemerdekaan, fungsi pers, serta peraturan-peraturan pemerintah tentang pers. Adapun perbedaan karya tersebut dengan skripsi adalah bahwa dalam karya tersebut tidak menjelaskan kegiatan-kegiatan PWI sebagai organisasi dan tidak ada penjelasan tentang pelanggaran-pelanggaran KEJ yang dialami PWI Cabang Jawa Tengah, serta tidak ada pembahasan tentang upaya dalam menangani kasus-kasus yang terjadi, sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk kemajuan organisasi wartawan yang ada di Jawa Tengah.

Buku *ketiga* adalah *Pers di Masa Orde Baru*, karya David T. Hill dengan penerjemah Gita Widya Laksmi S., tahun 2011.¹² Buku ini ditulis ketika tiga

¹²David T Hill, *Pers di Masa Orde Baru* Penerjemah: Gita Widya Laksmi S. (Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2011).

media massa, yaitu *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* dibredel oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1994. Pada saat itu, PWI pusat menyetujui hal tersebut, dan menyampaikan bahwa PWI patuh saja dengan keputusan pemerintah. Akhirnya PWI menjadi sasaran protes masyarakat karena pro dengan pemerintah dan tidak membela hak dari kawan seperjuangan yaitu koran *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* yang notabene sama-sama wartawan. Akibat pemberedelan, para pelanggan koran merasa kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang objektif dan bermutu. Para wartawan tidak dapat sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai agen kontrol sosial sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang pokok pers. Sedangkan para pekerja pers kehilangan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, selain kesejahteraan dan tunjangan keluarga. Pada saat itu pers Indonesia terperangkap dalam penjara Pers Pancasila, yang maknanya dikendalikan oleh pemerintah. Walaupun sudah menjadi semacam kodrat bahwa pers lahir untuk menyumbang upaya pembebasan dari kesempitan intelektual, namun aspirasi tersebut tidak selalu dipahami bahkan oleh kalangan sendiri. Contoh jelas adalah pernyataan PWI Pusat tentang pembredelan 21 Juni 1994 dan sikap PWI Cabang Jakarta yang tidak menginginkan “wartawan pembangkang” pemerintah untuk menjalankan profesinya.

Buku ini berisi penjelasan tentang keadaan pers pada masa Orde Baru, sehingga sangat penting untuk menunjang penelitian tentang PWI pada periode tersebut, karena PWI dianggap berlindung di bawah pemerintah Orde Baru. Buku karya David tersebut penting untuk mengetahui secara mendalam kehidupan pers pada masa Orde Baru. Buku ini telah melalui penelitian yang serius dan panjang yaitu sejak 1992 dan terjemahannya baru diterbitkan pada tahun 2011. Adapun perbedaan karya tersebut dengan skripsi adalah karya tersebut lebih banyak membahas perkembangan pers yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru dan tidak menjelaskan permasalahan yang di hadapi PWI sebagai organisasi secara lengkap dan mendalam, dan tidak membahas PWI berdasarkan cabang-cabang yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Penjelasan utama suatu peristiwa yang direkonstruksi tergantung pada pendekatan yang digunakan, sudut pandang, dimensi yang diperhatikan, serta unsur-unsur yang harus diungkapkan.¹³ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan politik dan jurnalistik. Dengan pendekatan politik, diungkap aspek-aspek sebagai berikut: sistem pemerintahan, pers, dan peraturan-peraturan tentang pers. Dari pendekatan jurnalistik, digunakan konsep-konsep kewartawanan, opini publik, dan KEJ.

Persatuan memiliki arti gabungan, ikatan, atau kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu.¹⁴ PWI merupakan perkumpulan dan ikatan antara wartawan-wartawan yang ada di daerah di seluruh Indonesia. PWI dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1946 yang diprakarsai oleh wartawan-wartawan senior yang berkumpul di Surakarta.

Pada periode 1980-1998 PWI merupakan suatu organisasi wartawan yang berada di bawah kontrol pemerintah Orde Baru. Orde Baru adalah sistem pemerintahan pada zaman kekuasaan presiden Suharto sejak 1966 sampai dengan 1998. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru memakai bentuk pemerintahan demokrasi yang dikenal dengan demokrasi Pancasila, suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Namun demikian, Orde Baru memiliki sifat otoriter yaitu suatu kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada pimpinan dan militeristik, karena hampir semua lembaga pemerintahan dipegang oleh pihak militer. Pers pada masa Orde Baru menjadi media pemerintah untuk mendukung dan menyebarkan kepentingan-kepentingannya kepada masyarakat.

PWI merupakan wadah bagi profesi wartawan, yang lahir untuk memenuhi keperluan masyarakat akan informasi secara terus menerus mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa besar atau kecil yang terjadi di dalam masyarakat. Pers adalah salah satu media yang digunakan oleh manusia sebagai

¹³Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, dalam skripsi Ahmad Yusuf (Semarang: Skripsi Sejarah, 2012), hlm. 13-14.

¹⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan,”. Diunduh dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id>., pada 03 Desember 2017.

alat untuk melakukan komunikasi. Fred S. Siebert, peneliti bidang pers, menyebutkan bahwa sistem kemasyarakatan akan mempengaruhi sistem pers. Jika masyarakatnya cenderung demokratis, maka pers pun akan bersifat demokratis. Pers dianggap bagian dari organ negara. Apa yang diyakini dan dianut oleh negara harus pula diterapkan dalam kehidupan pers.¹⁵

Hubungan antara pemerintah dan pers yang dibahas oleh Siebert dan kawan-kawan adalah hubungan-hubungan yang berkaitan dengan sistem politik yang berlaku, seperti hubungan antara penguasa dan pers dalam sistem otoriter. Dalam sistem otoriter, media massa merupakan alat penguasa pemerintah negara.¹⁶ Kekuasaan yang didapat oleh penguasa didasarkan pada kepercayaan bahwa kekuasaan itu diturunkan (*divine right*). Penerbitan pers yang ada dalam masyarakat dianggap sebagai alat penguasa dan karenanya setiap penerbitan pers harus ada izin dari pemerintah atau penguasa, dibuktikan dengan Surat Izin Terbit (SIT).

Pada masa Orde Baru kebebasan seorang wartawan sangat dikekang oleh pemerintah, dan pers tidak dapat bebas dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kondisi ini terbukti dengan pembredelan beberapa surat kabar oleh Orde Baru bagi media massa yang berani mengkritik pemerintah. Pembredelan surat kabar, dilakukan dengan mekanisme pencabutan SIT.

Pada Peraturan Menpen No. 03/Per/Menpen/1969 tentang Lembaga Surat Izin Terbit diatur bahwa SIT dapat dicabut jika penerbitan pers bertolak dari paham marxisme/komunisme/leninisme dan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada awal tahun 1978, praktik pembredelan pers oleh Orde Baru muncul kembali. Kali ini pers yang dicabut SIT-nya adalah pers yang menyiarkan berbagai kritik terhadap pelaksanaan

¹⁵Hasyim Asyari, Pembredelan TEMPO 1994: Wajah hukum pers sebagai alat represi politik negara Orde Baru (Jakarta: Pensil 324, 2009), hlm. 9.

¹⁶F. Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers: Analisis deskriptif sistem pers di berbagai negara (Jakarta: PT Gramedia, 1990), hlm. 29.

pemilu 1977, dan serentetan demonstrasi dan tuntutan mahasiswa yang menentang pemerintahan Suharto.¹⁷

Kebebasan pers bukan hanya merupakan hak bagi media pers, melainkan juga sebagai landasan bagi kewajiban yang harus dijalankan. Kebebasan pers dapat dilihat sebagai faktor penting bagi keberadaan media massa. Dari sudut pandang lain, kebebasan pers merupakan faktor demokrasi yang melandasi kehidupan kenegaraan. Dari sudut pandang politik, kebebasan pers dapat diartikan sebagai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat melalui pers.

Untuk memiliki pemikiran dan pendapat tentang masalah publik, masyarakat harus mendapatkan informasi yang faktual yang benar mengenai suatu berita dan wartawan merupakan aspek yang sangat penting dalam hal ini. Wartawan dituntut untuk bisa memberikan informasi yang aktual dan faktual yang diperlukan oleh setiap masyarakat.

Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu: pers sebagai media komunikasi yang tertua di dunia dan pers sebagai lembaga masyarakat atau instansi sosial yang merupakan bagian integral dari masyarakat. Sebagai lembaga masyarakat, pers mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat yang lain. Dari sudut pandang itu, menjadi jelas bahwa pers menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat.

Pers dapat menjalankan gerakan sosial, yaitu aktivitas sosial berupa gerakan yang berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.¹⁸ Namun demikian, PWI yang semula digambarkan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan dan sarana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, dapat terseret dalam pengaruh dan kontrol dari pihak yang lebih dominan. PWI semakin dikontrol ketat oleh negara dan pengusaha. Dalam hal ini PWI ditekan oleh dua kepentingan di luar dirinya, yaitu kekuasaan dan modal.

¹⁷Asyari, "Pembreidelan TEMPO 1994", hlm. 12.

¹⁸Ahmad Yusuf, "Aliansi Jurnalis Independen" Skripsi Jurusan Sejarah Undip, 2012, hlm. 16.

Undang-undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers menyatakan: “Organisasi pers adalah organisasi wartawan, perusahaan pers, grafika pers, dan organisasi media periklanan yang disetujui pemerintah.” Kemudian, ada surat Keputusan Menpen pada 20 Mei 1975 yang mengukuhkan PWI dan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit surat kabar Indonesia.

Selain itu, KEJ Wartawan Indonesia berbeda dengan Undang-Undang Pokok Pers (UU-Pokok Pers). Guna menjamin tegaknya kebebasan pers, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Profesionalisme wartawan adalah kegiatan seorang wartawan yang bersangkutan dengan profesi sebagai wartawan. Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Mutu, kualitas, dan tindakan merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional dalam menjalankan pekerjaan kewartawanan.¹⁹ Profesionalisme wartawan harus membawa ukuran keseimbangan dan kenetralan dalam pemberitaan. Wartawan bertanggungjawab terhadap masyarakat, majikan (pimpinan perusahaan), dan pasar.

Profesionalisme berarti paham yang menilai tinggi keahlian profesional secara umum atau kemampuan pribadi secara khusus, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan. Ada hubungan timbal balik antara sikap dan perilaku, yaitu perilaku profesionalisme, yang berkaitan erat dengan sikap dan perilaku dari wartawan yang bersangkutan. Sikap diarahkan pada benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lainnya. Sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang mengarahkan manusia untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu dalam menggapai objek, situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Hubungan antara sikap dan perilaku saling bergantung, apalagi bagi seorang wartawan. Dalam pendekatan jurnalistik akan terlihat jelas

¹⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan,”. Diunduh dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id>., pada 01 Oktober 2019.

dan ternilai bagaimana profesionalisme wartawan tampak pada diri seorang wartawan. Peneliti dengan cermat mendeskripsikan apa yang dilihat dari wartawan dalam hasil penelitiannya hingga menemukan makna sikap dan perilaku yang wartawan lakukan.²⁰

Profesionalisme wartawan dapat direalisasikan jika wartawan dapat memahami, mematuhi, dan menaati KEJ dan juga standar kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh PWI. Menurut Sumadiria dalam bukunya berjudul *Jurnalistik Indonesia*, seseorang disebut profesional apabila:

- a. Memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan pengalaman, pelatihan, atau pendidikan khusus di bidangnya. Wartawan profesional adalah wartawan yang pernah mengikuti pendidikan ataupun pelatihan khusus jurnalistik, dan juga memiliki pengalaman di bidang jurnalistik.
- b. Mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai dengan tingkat keahliannya, tingkat pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Wartawan profesional tentu mendapat gaji atau honor dari media tempat mereka bekerja. Sesuai dengan tingkat keahliannya, apakah masuk wartawan muda, madya atau wartawan senior.
- c. Seluruh sikap, perilaku, dan aktivitas pekerjaannya dipagari dengan dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik profesi, yaitu KEJ.
- d. Secara sukarela bersedia untuk bergabung dengan salah satu organisasi profesi yang sesuai dengan keahliannya. Wartawan tersebut bisa bergabung dengan PWI, di mana setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh anggotanya, guna mencapai wartawan yang profesional dan independen.
- e. Memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa terhadap bidang pekerjaan profesi yang dipilih dan ditekuninya. Melalui kecintaan dan dedikasinya

²⁰R. Indriane Chintia Lefti, "Perilaku Profesionalisme Wartawan" (Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014), hlm. 14.

wartawan harus mampu membangun jejaring dan lobi guna mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan akurat.

- f. Seorang wartawan harus memiliki keterampilan dan *skill* dalam melakukan kegiatan jurnalistik, terutama 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan) informasi yang dimilikinya, seorang wartawan profesional harus memiliki keterampilan dalam riset dan investigasi, menganalisa arah pemberitaan, serta memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi.²¹

Selain profesionalisme pada wartawan, ada Dewan Pers yang menerima kasus permasalahan pers dari PWI cabang se-Indonesia tentang pemberitaan media pers, yang meliputi berita, laporan, editorial, gambar yang telah diterbitkan dan disiarkan melalui media pers. Dengan posisinya sebagai mediator antara media pers dan masyarakat, Dewan Pers bersikap independen dan adil. Jika ada kasus-kasus pengaduan, Dewan Pers akan meminta Komisi Pengaduan untuk meneliti dengan seksama persoalannya dan kemudian mengeluarkan keputusan-keputusan dalam bentuk rekomendasi atau peringatan kepada media pers yang dinilai melanggar etika pers. Dewan Pers tidak akan menerima pengaduan atas kasus-kasus tentang media massa yang sudah dilaporkan ke pengadilan atau ranah hukum.

Kepatuhan terhadap etika profesi merupakan hal yang penting bagi segenap insan pers khususnya wartawan. Sesungguhnya kebebasan pers bukan hanya milik insan pers, tetapi juga milik segenap warga negara. Kebebasan pers dibutuhkan oleh segenap kekuatan dan perjuangan keras dari setiap warga negara untuk mendapatkannya. Kebebasan pers menjadi faktor penting bagi perjuangan menegakkan hak-hak rakyat, termasuk hak untuk memperoleh informasi secara benar dan objektif. Kebebasan pers seharusnya tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang justru dapat berakibat sebaliknya.

²¹Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hlm. 48.

Bagi para jurnalis yang menjadi anggota pada saat itu, arti kartu PWI adalah penting. Sebagai penjaga pintu gerbang pemerintah, PWI punya kuasa untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk ke dalam industri pers. Sejak November 1989, PWI menegaskan bahwa lembaga ini merupakan pemegang otoritas untuk mengeluarkan kartu identitas wartawan. Ukuran dari profesional dalam profesi wartawan bisa diukur dengan patuh tidaknya melaksanakan KEJ yang ada. Wartawan akan dinilai tidak profesional ketika mereka melanggar KEJ yang telah ditetapkan. Profesionalisme wartawan itu intinya kepatuhan wartawan dalam pekerjaannya sesuai dengan KEJ. Ukuran atau indikator dari profesionalisme itu sudah menguat adalah semakin bertambahnya jumlah anggota PWI Cabang Jawa Tengah.

Wartawan seperti dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang Pokok Pers adalah karyawan yang melakukan secara kontinyu pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lainnya untuk perusahaan pers, radio, televisi, dan film.²² Wartawan bebas bekerja di perusahaan pers baik media cetak, maupun televisi. Wartawan harus selalu memberikan informasi yang faktual yang tidak membuat banyak opini publik, atau salah pemahaman akan berita yang disajikan. Oleh sebab itu PWI tidak sembarangan dalam merekrut anggota baru.

Tes Uji Kompetensi Wartawan (UKW) wajib dilakukan sebelum merekrut wartawan untuk menjadi anggota PWI. Departemen Penerangan menunjukkan bahwa dari total 5.359 jurnalis periode 1980-1990, yang tercatat sebagai anggota PWI hanya 3.164 orang, karena banyak yang tidak lulus UKW ketika mendaftar menjadi anggota baru PWI. Karena keterikatannya dengan pemerintah melalui ketetapan Menpen, tidaklah mungkin bagi PWI untuk bersikap mandiri dan independen. Keterikatan itu menjadikan PWI sebagai bagian dari birokrasi pemerintah. Keanggotaan PWI memang membawa sejumlah keuntungan besar

²²M.L., Gandhi, Undang-undang Pokok Pers: Proses pembentukan dan penjelasannya (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 127.

bagi wartawan, misalnya tunjangan kesejahteraan dan akses guna mendapatkan subsidi rumah tinggal atau rumah dinas wartawan bersubsidi. Dengan adanya kerjasama dengan pihak lain di luar PWI, yang diperoleh PWI dengan adanya kerjasama adalah semakin terbukanya informasi dari instansi-instansi pemerintahan. Dahulu banyak sumber berita yang menutup diri untuk memberikan informasi kepada wartawan dan tidak ada keterbukaan informasi karena pada masa itu masih zaman Orde Baru. Setelah PWI bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat, ada keterbukaan informasi dan pihak lain sudah tidak menutup diri untuk memberikan informasi kepada wartawan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah kritis, yaitu prinsip dan aturan yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan kemudian menyajikan suatu sintesis fakta-fakta dalam bentuk tulisan ilmiah. Metode sejarah adalah cara bagi sejarawan untuk melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah.²³

Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah kritis adalah prosedur analisis yang ditempuh oleh sejarawan untuk menganalisis kesaksian atau fakta sejarah sebagai bukti yang dapat dipercaya mengenai masa lampau manusia.²⁴ Metode penelitian sejarah kritis terdiri atas empat tahap pokok yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi fakta dan historiografi.²⁵

²³Nugroho Notokusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Budaya, 1978), hlm. 11.

²⁴Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notokusanto (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 32.

²⁵Nugroho Notokusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder.²⁶ Pengumpulan sumber ini sangat penting guna memperoleh data yang dibutuhkan, baik secara tertulis maupun lisan. Sumber-sumber primer atau sekunder berupa buku-buku, surat kabar, dan artikel-artikel dalam majalah yang diperoleh dari Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan Jurusan Sejarah Undip, Perpustakaan Universitas Diponegoro, Perpustakaan Unnes, Perpustakaan UIN Walisongo dan perpustakaan PWI Surakarta, Perpustakaan PWI Jawa Tengah, kantor Arsip Kompas Jawa Tengah, Perpustakaan UGM, Perpustakaan Fisip Undip, Perpustakaan UNS, Depo Arsip Suara Merdeka, dan arsip koran digital Monumen Pers Nasional Surakarta.

Pencarian sumber-sumber buku dan artikel dilakukan pada bulan Juni-Desember 2017. Pencarian sumber-sumber berupa surat kabar dan arsip koran digital dilakukan pada bulan Januari-Oktober 2018. Pengumpulan sumber-sumber arsip koran di Suara Merdeka pada bulan Maret-Desember 2019. Pengumpulan sumber-sumber arsip koran di Perpustakaan Undip pada bulan Januari-Februari 2020.

Sumber lisan juga digunakan untuk melengkapi sumber sekunder yang berupa wawancara dengan tokoh-tokoh jurnalis dan masyarakat umum yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁷ Wawancara dilakukan dengan *interview by appointment* (wawancara dengan membuat janji terlebih dahulu) dengan tokoh-tokoh pers Jawa Tengah, yaitu Amir Machmud NS (Ketua PWI Jawa Tengah tahun 2020), Bambang Sadono (mantan Ketua PWI Jawa Tengah tahun 1990), Sasongko Tedjo (mantan Ketua PWI Jawa Tengah tahun 2000), Soetjipto (mantan Ketua PWI Jawa Tengah tahun 1999), Hendro Basuki (Bidang Pendidikan PWI Cabang Jateng 1996), Darjo Soyat (Sekretaris I PWI Jawa Tengah tahun 2018), dan

²⁶ Sartono Kartodirjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter*, dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 45.

²⁷Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Waca, 1994), hlm. 23.

Rofiudin (mantan Ketua AJI Semarang tahun 2012). Pengumpulan data sumber lisan dikumpulkan pada bulan Maret-Agustus 2019, Juli-November 2020.

Sumber-sumber sekunder adalah sumber yang bukan berasal dari orang pertama, contohnya buku, koran, majalah. Dalam penelitian ini digunakan buku-buku mengenai sejarah pers dan wartawan. Sumber-sumber lainnya berasal dari buku-buku kontemporer yang ditulis oleh berbagai kalangan pers dan akademisi bidang ilmu sosial, politik, hukum, dan jurnalistik.

Kritik sumber adalah tahap kedua dalam metode sejarah yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang otentik dan kredibel. Kritik sumber penting bagi peneliti untuk dapat menyaring informasi yang didapat selama proses pengumpulan data. Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, selanjutnya dilakukan pengujian sumber melalui dua macam kritik, yaitu kritik ekstern dan intern.²⁸ Kritik ekstern adalah kritik yang dilakukan untuk mengetahui otentisitas (keaslian) suatu sumber sejarah, apakah sumber itu asli atau palsu secara fisik. Pada tahap berikutnya dilakukan kritik intern. Ini dilakukan untuk memperoleh kredibilitas dari sebuah dokumen. Kritik intern dilakukan antara lain pada surat kabar, karena surat kabar seringkali menarik perhatian dan membuat berita yang sensasional, sehingga sering terjadi penggambaran suatu kejadian atau pemutarbalikan fakta-fakta.²⁹

Kritik terhadap berbagai sumber harus dilakukan, karena dalam sumber-sumber sekunder yang diterbitkan pada masa Orde Baru, terdapat kecenderungan yang saling bertentangan. Untuk mengatasi kekurangan pada sumber-sumber sejarah, dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu para anggota PWI yang masih aktif di dunia pers atau yang sudah pensiun. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh perbandingan dengan sumber sekunder dan primer yang diperoleh. Berbagai sumber memiliki nilai subjektivitas

²⁸Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, hlm. 80.

²⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 108.

yang sangat tinggi, karena itu uji perbandingan sumber harus dilakukan dalam penelitian ini.

Interpretasi merupakan tahap ketiga metode sejarah sebelum historiografi. Pada tahap ini ditetapkan makna dan hubungan antar fakta. Dalam proses ini peranan imajinasi sangat besar, karena imajinasi membantu sejarawan untuk membuat sintesis yang disusun dalam kalimat sehingga bermakna. Tahap ini menuntut daya imajinasi peneliti dalam menggambarkan suatu kejadian masa lalu dengan bantuan konsep-konsep atau teori-teori yang berguna sebagai perangkat analisis.

Tahap terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Dalam tahap ini fakta yang sudah disintesis kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami oleh para pembaca dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri atas lima bab. Bab pertama berisi uraian tentang pendahuluan, latar belakang dan permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat ulasan mengenai proses awal pembentukan PWI. Pembahasan pada bab ini untuk menjelaskan pertanyaan penelitian *pertama* yaitu proses awal pembentukan PWI dari pusat hingga cabang.

Bab III memuat uraian tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada periode 1980-1998, dan kasus-kasus pelanggaran KEJ yang dihadapi PWI Cabang Jawa Tengah. Pada bab ini dijelaskan semua pelanggaran KEJ yang dihadapi PWI Cabang Jawa Tengah pada masa kepemimpinan Sutrisna hingga Kepemimpinan Bambang Sadono. Pembahasan pada bab ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang *kedua* yaitu permasalahan apa saja yang dihadapi PWI Cabang Jawa Tengah.

Bab IV memuat pembahasan tentang upaya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran KEJ serta penguatan profesionalisme wartawan anggota PWI Cabang

Jawa Tengah. Pada bab ini dibahas jawaban atas pertanyaan penelitian *ketiga* yaitu tentang upaya penguatan profesionalisme wartawan PWI Cabang Jawa Tengah.

Bab V adalah simpulan, yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan pandangan penulis tentang kedudukan wartawan PWI Cabang Jawa Tengah pada tahun 1980-1998.